

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dimana rakyat akan mendapatkan persamaan dan kebebasan dalam menentukan hak politiknya baik hak dalam memilih pemimpin politik maupun hak dipilih sebagai pemimpin dalam pemilihan umum. Demokrasi dianggap penting karena melalui demokrasi akan terwujud *good government and good society*, oleh karena itu untuk mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang baik diperlukan partisipasi dari seluruh warga negara. Bentuk partisipasi politik salah satunya adalah memilih dan mengajukan diri sebagai calon yang dipilih dalam pemilihan umum. Konsepsi demokrasi yang didasarkan pada partisipasi warga negara salah satunya keterlibatan dalam aspek politiknya sebagai bentuk kebebasan bermusyawarah untuk kemajuan negara (Parvin, 2018).

Penggunaan hak politik warga negara seringkali dipengaruhi beberapa faktor, dijelaskan oleh Fisher et al., (2017) bahwa ketika warga negara memilih pemimpin didasarkan pada faktor sosiologis seperti pekerjaan, pendidikan, agama, wilayah, jenis kelamin dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut diyakini menjadi bentuk kebebasan berpendapat dan menjadi bagian dari sistem demokrasi. Diantara berbagai faktor yang mendasari warga negara dalam memilih pemimpin politiknya, salah satu faktor yang dipertimbangkan terkait dengan gender yang menjadi pemimpin mereka. Pada hakikatnya hak politik di negara demokrasi bersifat bebas namun dalam kenyataannya masih terdapat dikotomi dalam masyarakat mengenai kepemimpinan berdasarkan gendernya. Politika *Research and Consulting* (PRC) dalam surveinya mengenai pemilihan pemimpin dengan berlatarbelakang gender menunjukkan bahwa, sebanyak 72,2% menunjukkan bahwa pemimpin laki-laki lebih dapat diandalkan dibandingkan pemimpin perempuan, yang mana pemimpin perempuan dianggap terkonstruksikan secara sosial budaya dan agama di Indonesia sehingga sulit mencapai tatanan kepemimpinan yang tinggi (Cahyadi, 2020). Masyarakat sering mengasumsikan bahwa maskulinitas adalah keadaan alamiah manusia atau takdir sebagaimana perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, salah satunya dalam kepemimpinannya.

Ayu Riyanti, 2021

**MODAL SOSIAL POLITISI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAMAYU**

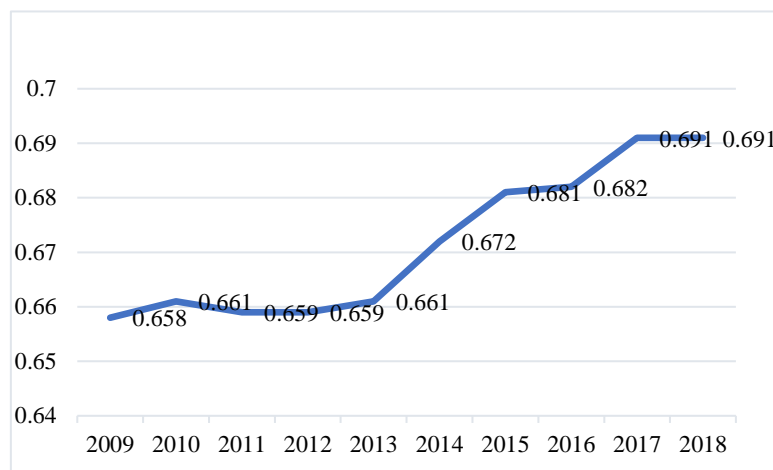
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Adanya asumsi secara kultural dan sosial tersebut, selama ini perempuan dianggap sebagai kaum inferior yang memiliki gaya feminin yang lemah lembut sehingga tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin, sedangkan laki-laki dianggap sebagai kaum yang superior karena memiliki gaya yang maskulin yang dianggap mampu untuk mengayomi masyarakat. Karena asumsi itu pula perempuan di konstruksikan oleh masyarakat sebagai kaum yang khusus bekerja pada sektor domestik, mengurus anak-anak, menjadi ibu, memasak untuk keluarga dan lain sebagainya. Keadaan seperti itu memberikan batasan yang sangat terlihat pada hal-hal yang dilakukan perempuan serta hak-hak yang perempuan dapatkan dalam kehidupan di masyarakat, dengan adanya anggapan umum bahwa maskulin umumnya dianggap lebih unggul daripada feminitas (Nurbayani et al., 2019). Apabila perempuan ingin bekerja di ranah publik, mereka hanya memiliki pekerjaan yang merupakan kepanjangan tangan dari tugas-tugas domestik yang sering mereka lakukan. Sedangkan laki-laki di konstruksikan sebagai kaum yang bekerja di sektor publik dan pantas untuk memimpin berbagai hal dalam kehidupan. Dikotomi sektor publik dan sektor domestik yang digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan pemisahan jenis kelamin tersebut telah menciptakan jarak laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosialnya. Sehingga laki-laki seakan terkonstruksikan oleh masyarakat memiliki status yang tinggi dari pada perempuan.

Konstruksi sosial masyarakat Indonesia menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam kehidupan salah satunya partisipasi politik (Nurbayani et al., 2019). Pada dasarnya, perbedaan gender dengan pemilihan sifat, peran dan posisi tidak akan menjadi masalah sepanjang hal tersebut tidak melahirkan ketidakadilan. Bibler et al., (2014) dalam penelitiannya bersama *United States Agency for International Development (USAID)* menyatakan bahwa, sekitar 21,7% perempuan di dunia yang menempati kursi parlemen atau dewan perwakilan, dan mereka masih termajinalisasikan hingga tidak terwakilkan dalam proses politik atau kepemiluan di berbagai negara. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan berbasis gender yang dialami perempuan, yang mana masih terdapat asumsi beban kerja gender dengan dukungan faktor struktural dan kultural yang langgeng di masyarakat. Bentuk ketidakadilan gender tersebut dihadapkan pada adanya marginalisasi, stereotip, subordinasi berkenaan dengan perbedaan fungsi, peran, tugas, tanggungjawab, hingga kedudukan berbasis gender (Rasyidinn & Aruni, 2016). Cerminan dari bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan adalah ketika proses pengambilan keputusan politik seperti kebijakan yang tidak memberikan kesempatan

yang sama bagi perempuan. Padahal seyogyanya perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat penuh dan aktif dalam sistem politik berdasarkan demokrasi.

Seiring berkembangnya wacana ketidakadilan gender ini, juga banyak berbagai aktivis hingga akademisi yang menggaungkan kesetaraan gender. Wacana kesetaraan gender ini memberikan dampak positif terhadap eksistensi perempuan dalam dunia publik. *Global Gender Gap Index Report* yang dirilis oleh *World Economic Forum* (2019) mencatatkan bahwa, pada tahun 2018 Indonesia menempati peringkat 85 dari 149 negara yang disurvei dengan indeks gender gap 0,691. Selain itu, juga laporan tersebut menunjukkan dalam kurun jangka waktu 10 tahun sejak 2009 hingga 2018 di Indonesia mengalami perubahan *gender gap* yang tersaji pada grafik berikut:



Gambar 1.1 Gender Gap di Indonesia

Sumber: World Economic Forum (2019)

Berdasarkan indeks laporan dari *Global Gender Gap Index Report* selama satu dekade yang tersaji pada grafik gambar 1.1 diatas, menunjukkan perubahan gender gap yangmana adanya perubahan struktur peranan perempuan di Indonesia yang dapat berpartisipasi dalam peran domestik di masyarakat. Beberapa aspek kehidupan tersebut berupa partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup serta pemberdayaan politik perempuan di Indonesia yang menunjukkan peningkatan secara signifikan. Faktor pendidikan menjadi awal pemicu perempuan dapat berpartisipasi dalam peran domestik, yang mana kaum perempuan telah memberikan perspektif dan wawasan yang lebih luas kepada perempuan mengenai peranan dan eksistensi mereka dalam kehidupan

bermasyarakat. Potensi yang dimiliki perempuan karena menempuh pendidikan tinggi telah memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk bergerak di wilayah publik, termasuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik dan pemerintahan, yang selama ini sebetulnya mereka juga memiliki kapasitas untuk berperan di ranah publik seperti berpolitik (Malihah et al., 2020).

Emansipasi perempuan dalam bidang politik menunjukkan bahwa perempuan seyogyanya memiliki kemampuan untuk turut berpartisipasi dalam kontestasi politik. Jeumpa (2016) mengungkapkan bahwa dalam politik, nilai dominan berupa kekuasaan memiliki kriteria yang terdiri dari kemampuan (*ability*), kecakapan (*capacity*), kesanggupan (*faculty*), dan kepandaian (*skill*). Dengan demikian, keikutsertaan perempuan secara partisipatif tidak dapat dinilai dari aspek gender semata sehingga perempuan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan politik selama memenuhi kriteria tersebut. Peran perempuan tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab perempuan dalam konstelasi demokrasi sangat erat kaitannya dengan pemilihan pemimpin negara, terlihat dengan menjadi faktor keberhasilan para pemimpin laki-laki. Pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, dijelaskan bahwa setiap partai politik seyogyanya melibatkan peran keterwakilan perempuan dalam politik paling sedikit 30%. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah juga menjadikan keterwakilan perempuan dalam politik harus diakui dengan acuan bahwa peserta pemilihan umum perempuan minimal 30%.

Pada tanggal 17 April 2019 menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia dengan diselenggarakannya pemilihan umum dari mulai pemilihan presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dewan perwakilan Daerah yang biasa diadakan setiap lima tahun sekali. Pada perhelatan pemilu tahun 2019 pun tercermin bahwa partisipasi politik perempuan mendapat antusias yang sangat baik, termasuk dalam kontestasi politik tingkat lokal seperti pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia. Pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Indramayu untuk periode 2019-2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD pada pemilihan Umum tahun 2019 melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 98/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018/tanggal 20 September 2018, yang menjabarkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % pada setiap partai politik. Data mengenai partisipasi keterwakilan perempuan dari beberapa partai pada KPU Kabupaten Indramayu tersaji pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Partisipasi Politik Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu

Nama Partai Politik	Jumlah DAPIL dalam DCT	Jumlah Laki-laki / Perempuan		Jumlah Calon dalam DCT	Keterwakilan Perempuan (%)
		L	P		
PDI PEJUANGAN	6	33	17	50	34%
GOLKAR	6	31	19	50	38%
PSI	6	21	13	34	38%
PKS	6	26	17	43	39%
PAN	6	5	10	19	47,36%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Indramayu (2019)

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa, dalam segi kuantitas peserta politisi perempuan yang sudah mengacu pada kebijakan undang-undang minimal 30% yang mengajukan diri menjadi perwakilan perempuan di setiap partai yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di Kabupaten Indramayu periode 2019-2024. Peningkatan partisipasi politik tersebut menunjukkan bahwa, pesta demokrasi beragam dengan hadirnya peran perempuan dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif di tingkat lokal. Keterlibatan perempuan menjadi politisi yang selama ini banyak didominasi oleh kandidat laki-laki, menunjukkan perubahan terhadap sistem demokrasi yang menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam mencapai hak politiknya.

Hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Indramayu untuk periode 2019-2024 pada akhirnya melantik 50 orang, yang diantaranya terdapat keterwakilan perempuan sebanyak 18 orang. Khaerunisah et al., (2018) dalam studi terdahulunya mengungkapkan bahwa, keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Indramayu untuk periode 2014-2019 menunjukkan terdapat 13 wakil perempuan yang terpilih. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada periode 2014-2019 yang terpilih sebanyak 13 wakil, dan periode 2019-2024 yang terpilih sebanyak 18 wakil perempuan. Terpilihnya sejumlah kandidat

Ayu Riyanti, 2021

MODAL SOSIAL POLITISI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAMAYU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dari kalangan perempuan sebagai anggota DPRD di Kabupaten Indramayu periode 2019-2024 tersebut, tidak terlepas pada pengaruh dan dukungan berbagai macam pihak dan beberapa faktor. Salah satu faktor yang berperan penting dalam memengaruhi dan mendukung kemenangan para kandidat anggota legislatif dalam kontestasi politik tingkat lokal, selain karena faktor modal ekonomi, modal budaya dan modal politik yakni karena di dukung oleh faktor modal sosial.

Dalam pandangan Bourdieu, modal sosial mencakup didalamnya relasi atau hubungan antara individu-individu dengan masyarakat secara luas di dalam sebuah struktur sosial dan jaringan sosial, yang pada akhirnya dapat menghasilkan dan membentuk seperti misalnya kedekatan, kepercayaan, dukungan, kerjasama dan hal-hal lainnya. Wahyudi (2018) mengungkapkan bahwa, dalam politik terdapat 3 modal yang dihadapi oleh keterwakilan perempuan mencakup modal politik, modal ekonomi, dan modal sosial. Aspek modal sosial menjadi komponen yang penting untuk dilakukan oleh politisi perempuan dalam kontestasi politik pemilihan umum. Sarker & Islam (2017) menyatakan bahwa, aspek modal sosial menjadi aspek penting dalam partisipasi politik yang bersifat sebagai alat perekat untuk mendukung sistem demokrasi dalam sebuah negara. Dengan demikian, secara tidak langsung modal sosial memiliki peranan penting sebagai bagian dari sistem demokrasi dan menjadi faktor penentu kesuksesan sebuah kompetisi, dalam hal ini seperti dalam kontestasi politik.

Komponen modal sosial sendiri terbentuk dari hubungan sosial yang didasarkan pada kapabilitas kepercayaan secara timbal balik. Kepercayaan ini biasanya dapat di pengaruhi oleh latar belakang sosial kandidat itu sendiri, seperti dari latar belakang keluarga, tingkat pendidikan, rekam jejak kehidupannya, hubungannya dengan masyarakat dan hal-hal lainnya. Maka, dalam kontestasi politik seperti dalam pemilihan umum, modal sosial bisa dikatakan sebagai suatu dukungan figur kandidat karena ketokohan. Figur ketokohan tersebut dapat menumbuhkan adanya kepercayaan dari masyarakat dan bagaimana menciptakan interaksi sosial dan jaringan-jaringan yang mendukung (Mayger & Hochbein, 2020).

Pada persaingan kontestasi politik, tidak dipungkiri bahwa, modal sosial belum tentu dimiliki oleh setiap orang. Artinya, modal sosial terkadang bukan suatu hal yang muncul, terbangun dan terbentuk begitu saja. Setiap kandidat, dalam hal ini seperti perempuan politisi yang mencalonkan diri seperti di dalam kontestasi politik di tingkat lokal, akan sangat mungkin memiliki cara-cara tersendiri di dalam membangun modal sosialnya. Dan pada akhirnya mereka kemungkinan juga akan memiliki bentuk-bentuk modal sosial yang berbeda, yang nantinya dapat menentukan kekuatan modal politiknya masing-masing. Baharuddin &

Ayu Riyanti, 2021

MODAL SOSIAL POLITISI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAMAYU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Purwaningsih (2017) mengungkapkan bahwa, modal sosial yang mendukung sistem politik terbentuk melalui kriteria, (1) Adanya kepercayaan dari masyarakat; (2) Adanya interaksi sosial; dan (3) Adanya jaringan relasi yang mendukung. Terpilihnya 20 politisi perempuan sebagai anggota DPRD di Kabupaten Indramayu periode 2019-2024 tersebut sangat mungkin salah satunya di pengaruhi oleh faktor modal sosial yang dimiliki oleh para kandidat, baik modal sosial yang dimiliki jauh sebelum melakukan kampanye, maupun modal sosial yang di bangun oleh kandidat ketika pada saat melakukan kampanye dalam pemilihan calon anggota DPRD di Kabupaten Indramayu periode 2019-2024.

Nurchahyo (2016) mengungkapkan, ketika perempuan yang berkecimpung untuk memimpin ranah politik terdapat tantangan dan keterbatasan, diantaranya seperti masalah menyangkut finansial dan basis sosialnya dianggapnya juga lemah. Tantangan lainnya yang dihadapi oleh perempuan dalam kontestasi politik di tingkat lokal adalah adanya kultur patriarki yang terkadang masih muncul di dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Malihah et al., (2020) bahwa, perempuan masih dianggap memiliki kedudukan satu level dibawah laki-laki, disebabkan oleh konstruksi budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat, akan dapat berpotensi mengakibatkan kaum perempuan menjadi termarginalisasi, tersubordinasi dan sulit untuk keluar dari dominasi kaum laki-laki. Permasalahan lainnya yang muncul adalah anggapan masyarakat yang menggunakan standar ganda dalam menilai kapasitas peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Haryono (2014) yang melihat bahwa anggapan masyarakat banyak yang menilai perempuan yang objektif bukan melihat kapasitasnya hingga visi misi politik, tetapi faktor fisik yang dimiliki seorang perempuan.

Partisipasi perempuan sebagai politisi yang terhambat modal sosialnya dengan adanya marginalisasi, subordinasi, stereotip, hingga dominasi baik secara kultural maupun struktural. Indonesia sendiri menganut paham budaya patriarki yang kental, dan hal inilah yang menghambat partisipasi perempuan dalam keterwakilannya pada ranah politik. Seperti yang diungkapkan Malihah et al., (2020) dalam penelitiannya hambatan partisipasi perempuan sebagai politisi terbatas adanya budaya feodal dan patriarki yang mengungkung perempuan pada ranah-ranah domestik, adanya pemahaman masyarakat yang konservatif atas tafsir ajaran agama, hingga hegemoni negara yang masih besar terhadap warga negara yang terlihat dari dukungan atas budaya patriarki dalam segala aspek.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka pada penelitian ini akan berfokus menelaah sejauhmana modal sosial memiliki peranan penting sehingga sebanyak 20

Ayu Riyanti, 2021

MODAL SOSIAL POLITISI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAMAYU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perempuan politisi terpilih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Indramayu periode 2019-2024. Maka dari itu, Peneliti tertarik menelaah secara mendalam bagaimana bentuk-bentuk modal sosial yang dimiliki oleh para politisi perempuan yang akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode 2019-2024. Selain itu, Peneliti juga akan mengkaji bagaimana modal sosial dapat berperan dalam membangun kekuatan politik para politisi perempuan di tengah-tengah budaya patriarki yang terkadang masih ada di dalam masyarakat, terutama di tingkat lokal. Dan yang terakhir, Peneliti ingin mengkaji bagaimana hambatan-hambatan yang di hadapi para politisi perempuan selama proses pemilihan calon anggota DPRD di Kabupaten Indramayu periode 2019-2024. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang demikian, maka Peneliti memberi judul penelitian “Modal Sosial Politisi Perempuan dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Indramayu”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka pada penelitian rumusan masalah yang akan ditelaah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk modal sosial politisi perempuan dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana peran modal sosial dalam membangun kekuatan politik politisi perempuan pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Indramayu?
3. Apa hambatan yang dihadapi politisi perempuan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Indramayu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini secara umum akan mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam informasi teoretis dan empirik mengenai bentuk dan peran modal sosial politisi perempuan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Indramayu. Secara khusus penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk modal sosial yang dimiliki politisi perempuan dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Indramayu.
2. Menganalisis peran modal sosial dalam membangun kekuatan politik politisi perempuan di tengah-tengah budaya patriarki yang masih ada di dalam masyarakat

pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Indramayu.

3. Mengidentifikasi setiap hambatan-hambatan dan tantangan yang dihadapi politisi perempuan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Indramayu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan tentang modal sosial, terutama modal sosial yang dimiliki para kandidat politisi perempuan di dalam kontestasi politik lokal seperti dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Indramayu.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga mereka mengetahui dan memahami tentang bagaimana modal sosial para kandidat politisi perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD tahun 2019 di Kabupaten Indramayu. Sehingga bagi masyarakat, terutama dari kalangan perempuan yang ingin ikut berpartisipasi dalam ranah politik, dalam hal ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam kontestasi politik di tingkat lokal seperti dalam pemilihan anggota DPRD.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan sebagai rujukan untuk membuat kebijakan mengenai keterwakilan politisi yang mencalonkan diri sebagai kandidat anggota legislatif di tingkat daerah seperti dalam pemilihan calon anggota DPRD tahun 2019 di Kabupaten Indramayu.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengukur kemampuan peneliti dalam mengkaji serta menganalisis tentang modal sosial perempuan politisi yang ikut berpartisipasi dalam kontestasi politik di tingkat lokal.

1.5 Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan tesis ini, Peneliti akan menguraikan secara singkat gambaran setiap bab yang secara jelas akan mengarahkan pada bentuk pembahasan secara mendalam. Sistematika penulisan Tesis ini akan dibagi menjadi lima bab. Kelima bab tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi enam bagian, yakni latar belakang penelitian, bentuk permasalahan penelitian, uraian mengenai pertanyaan penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dari adanya penelitian, dan sistematika penulisan penelitian tesis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, konsep teoritis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode pendekatan yang menjadi landasan penulisan, yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian yang dilakukan, deskripsi informan penelitian, teknik pengumpulan dan jenis data, teknik pengolahan data penelitian, strategi validasi dan analisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini Peneliti menguraikan temuan penelitian sesuai rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, juga diuraikan pembahasan penelitian yang mengkaitkan temuan dengan teori dan analisis penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP

Bab ini Peneliti menguraikan hasil kesimpulan penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab I. Selain itu, Peneliti juga akan memberikan implikasi dan rekomendasi yang relevan dengan permasalahan.